

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

Sabirin

ABSTRAK

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi sumber daya alam yang belum dimaksimalkan baik dari pemanfaatan hasil hutan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Berbagai program pemerintah yang dianggarkan relatif besar, dan dijalankan untuk kemajuan daerah. Namun belum banyak tampak terjadi perubahan yang signifikan untuk masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Lingga. Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat. khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di sektor usaha pupuk kompos dalam mendukung program pembangunan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Singkep di Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Singkep di Kabupaten Lingga.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, karena lokasi penelitian ini memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam yang beragam, serta dan kultur budaya yang kental dengan adat, pada kenyataannya jika melihat dari beberapa aspek sosial, budaya dan ekonomi kesejahteraan mereka belum merata.

Elemen utama dari pemberdayaan adalah pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Kebijakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat mendukung peningkatan kemandirian masyarakat diberbagai sektor serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya peraturan daerah ini sebagai instrumen pendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian serta kebijakan program kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu pembangunan pertanian daerah. Meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan berupa implikasi terhadap teknologi, minimnya pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha serta terbatasnya akses pemasaran.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat.*

IMPLEMENTATION OF POLICY VILLAGE EMPOWERMENT POLICY IN SUB DISTRICT SINGKEP DISTRICT LINGGA

SABIRIN

ABSTRACT

Lingga Regency has various potential of natural resources that have not been maximized either from the utilization of forest products, agriculture, plantation and others run for government progress which is budgeted relatively big, and run for regional progress. But there has not been much visible significant change for the people in the region. Lingga District Government has a duty to carry out the administration in the field of government, development and empowerment and provide excellent service to the community of Lingga District. In Article 5 of Regional Regulation of Lingga Regency Number 3 Year 2016 on Community Empowerment, especially in community empowerment in composted fertilizer business sector in support of agriculture development program which initiated by Regional Government of Lingga Regency.

This research uses qualitative analysis technique using qualitative descriptive research design. The research was conducted in Singkep sub-district, Lingga district, because the location of this research has wide area, diverse natural resources, and cultural culture that is thick with custom, in fact if looking from some aspects of social, cultural and economic prosperity they have not evenly

This research aims to know and explain the implementation of community empowerment policy of Singkep Subdistrict in Lingga District because of the location of this research in Lingga to know about the location of Research and cultural culture which is thick with adat in reality if looking from social culture aspect and welfare economy not evenly.

The main element of empowerment is the development of community's own capacity. Community empowerment policy in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2016 on Community Empowerment and Villages strongly supports the improvement of community independence in various sectors and the improvement of community welfare. Coupled with the existence of this regulation as an instrument program supporting the Long Term Development Plan Area (RPJMD) to achieve prosperity of society in agriculture sector and program policy of region head in Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) that is Development of agriculture area. Although in the implementation there are still obstacles in the form of implications for technology, lack of development of advice and infrastructure pernungjang business and limited access to marketing

Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment